



Sumber: <https://tirto.id/uu-otsus-papua-jilid-2-uang-tak-menyelesaikan-konflik->

Judul Skripsi:

Analisis Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua Dan Implikasinya Terhadap Kehadiran Orang Asli Papua Dalam Mengatur Daerah Otonomi Baru

Tugas Akhir Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S.1

Nama: Muhammad Apriliansyah

NIM: 1810413109



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA



SKRIPSI

Judul Skripsi

**ANALISIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHADIRAN ORANG ASLI PAPUA DALAM MENGATUR
DAERAH OTONOMI BARU**

Disusun Oleh :

Muhammad Apriliansyah

1810413109

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PRODI ILMU POLITIK

2023

**ANALISIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHADIRAN ORANG ASLI PAPUA DALAM
MENGATUR DAERAH OTONOMI BARU**

***ANALYSIS OF THE REVISION OF LAW NUMBER 2 OF 2021
CONCERNING PAPUA'S SPECIAL AUTONOMY AND ITS
IMPLICATIONS FOR THE PRESENCE OF ORIGINAL PAPUAN
PEOPLE IN ADMINISTERING THE NEW AUTONOMOUS AREA***

Oleh:
**Muhammad Apriliansyah
1810413109**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada
tanggal seperti tertera di bawah ini

Jakarta, 11 Januari 2023

Pembimbing Utama



Sri Lestari Wahyuningroem, Ph. D.

Pembimbing Pendamping



Dr. Deni Angela., S.Sos., M.I.P



Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Tahun 2023

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Apriliansyah

NIM : 1810413109

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHADIRAN ORANG ASLI PAPUA DALAM MENGATUR DAERAH OTONOMI BARU

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Jakarta, 7 Februari 2023

Yang menyatakan



Muhammad Apriliansyah

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk saya nyatakan dengan benar:

Nama : Muhammad Apriliansyah

NIM : 1810413109

Program Studi : Ilmu Politik

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 17 Januari, 2023

Yang menyatakan



Muhammad Apriliansyah

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Apriiliansyah

NIM : 1810413109

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : ANALISIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHADIRAN ORANG ASLI PAPUA DALAM MENGATUR DAERAH OTONOMI BARU

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing I



Sri Lestari Wahyuningroem, Ph.D.

Penguji I



Dr. Ardli Johan, M.HI

Penguji II



Dr. Deni Angela., S.Sos., M.I.P

Ketua Program Studi



Restu Rahmawati, S.Sos., MA.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 21 Januari 2023

**ANALISIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHADIRAN ORANG ASLI PAPUA DALAM MENGATUR
DAERAH OTONOMI BARU**

MUHAMMAD APRILIANSYAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas analisis revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dan Implikasinya Terhadap Kehadiran Orang Asli Papua dalam Mengatur Daerah Otonomi Baru. Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua khususnya pasal 76 secara tidak langsung menghilangkan kewenangan lembaga legislatif Papua yaitu DPRD dan MRP dalam hal memekarkan wilayah Papua dan Pemerintah Pusat memiliki wewenang penuh untuk memekarkan wilayah Papua tanpa menunggu persetujuan MRP dan DPRD, sehingga secara tidak langsung hal tersebut sudah melemahkan atau bahkan menghilangkan hak politik Orang Asli Papua dalam mengatur daerah otonomi baru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode analisis naratif dan diskursus dengan menggunakan data primer serta sekunder diantaranya berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penulis juga menggunakan empat tahapan analisis data diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat usaha sentralisasi dari Pemerintah Pusat dalam menekan gerakan separatisme di Papua dengan cara penambahan aparat keamanan yang sejalan dengan pemekaran Provinsi di Papua. Pemerintah Pusat menilai kinerja MRP selama berjalannya Otonomi Khusus Papua dari tahun 2001 hingga 2021 belum secara maksimal, dan perlu adanya campur tangan Pemerintah Pusat agar pembangunan yang terjadi di Papua berjalan dengan lancar. Proses penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 sendiri tidak melibatkan partisipasi MRP dan DPRD selaku lembaga legislatif dan representatif kultural OAP yang diakui negara, yang menyebabkan hilangnya makna politik kehadiran yang menjadi tujuan awal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Analisis kebijakan kritis yang penulis lakukan terhadap kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua menilai bahwa Pemerintah Pusat menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan keuntungan dan Orang Asli Papua diabaikan karena tidak memiliki kesempatan dalam penyusunan kebijakan untuk wilayahnya sendiri.

Kata kunci: otonomi khusus papua, politik kehadiran, analisis kebijakan kritis, hilangnya kewenangan lembaga legislatif

**ANALYSIS OF THE REVISION OF LAW NUMBER 2 OF 2021
CONCERNING PAPUA'S SPECIAL AUTONOMY AND ITS IMPLICATIONS
FOR THE PRESENCE OF ORIGINAL PAPUAN PEOPLE IN
ADMINISTERING THE NEW AUTONOMOUS AREA**

MUHAMMAD APRILIANSYAH

ABSTRACT

This study aims to discuss the analysis of the revision of Law Number 2 of 2021 concerning the Special Autonomy of Papua and its Implications for the Presence of Indigenous Papuans in Regulating the New Autonomous Region. Amendment to Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua, in particular article 76, indirectly eliminates the authority of the Papuan legislative bodies, namely the DPRP and MRP in terms of dividing the Papua region and the Central Government has full authority to divide the Papua region without waiting for the approval of the MRP and DPRP, so indirectly this has weakened or even eliminated the political rights of Indigenous Papuans in governing the new autonomous region.

The method used in this research is descriptive qualitative with narrative and discourse analysis using primary and secondary data including interviews, documentation, and literature study. The author also uses four stages of data analysis including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results obtained from this study indicate that there has been a centralization effort from the Central Government in suppressing separatist movements in Papua by adding security personnel which is in line with the division of the Province in Papua. The Central Government considers that the performance of the MRP during the implementation of the Special Autonomy for Papua from 2001 to 2021 has not been maximized, and that there is a need for Central Government intervention so that the development that is taking place in Papua runs smoothly. The process of drafting changes to Law Number 2 of 2021 itself does not involve the participation of the MRP and DPRP as legislative and cultural representative institutions of the OAP that are recognized by the state, which causes the loss of the political meaning of presence which was the initial goal in Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua. The critical policy analysis that the author conducted on the policy of Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua considers that the Central Government uses its power to benefit and Indigenous Papuans are ignored because they do not have the opportunity to formulate policies for their own territory.

Keywords: *Papua Special Autonomy, Presence Politics, Critical Policy Analysis, Loss of Legislative Authority*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua Dan Implikasinya Terhadap Kehadiran Orang Asli Papua Dalam Mengatur Daerah Otonomi Baru**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Sri Lestari Wahyuningroem, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I peneliti yang sudah membimbing, membantu, memberikan masukan dan saran serta semangat kepada saya sebagai penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih saya ucapkan kepada Ibu, semoga Ibu dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup.
2. Bapak Dr. Deni Angela S.Sos, M.I.P. selaku selaku Dosen Pembimbing II peneliti yang sudah membimbing, membantu, memberikan masukan dan saran serta semangat kepada saya sebagai penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih saya ucapkan kepada Bapak, semoga Bapak dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup.
3. Keluarga saya yaitu Mamah Erna Suryana, Papah Ferdi Sukasah, dan kedua kakak saya Alvino Aldi dan Melisha Septiani, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang menunggu saya hingga mencapai pada tahap ini. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
4. Terimakasih juga kepada teman-teman THT *Needed* saya, Syafa, Agil dan Gaby yang walaupun sekarang sedang berjuang di jalannya masing-masing, tetapi

tetap bisa mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tetap saling menyayangi satu sama lain, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

5. Terimakasih kepada teman-teman saya Dgang Chasis yaitu Ajeng, Tika, Agil, Raka, Dito, David, dan Sultan yang terus selalu mendukung penulis dan menyemangati penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga kita semua tetap bisa saling mendukung satu sama lain.
6. Terimakasih kepada Jody, Shabrina, Billy, Bella, Cakra, bang Dandy dan anggota PSM Gita Advayatva yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani penulis selama kuliah dan terus memberikan semangat kepada penulis, semoga kita semua tetap bisa berkarya bersama.
7. Terimakasih juga kepada Rifki, Atam, Farid, Rahmat, Randy, Johanes, Aura, Alexandro, Sasya, dan teman-teman politik lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani penulis selama berkuliah dan menjadi teman berjuang bersama dalam kuliah ini, semoga kita semua bisa sukses.
8. Terimakasih kepada Hendri, Noval, Ray, Fawaz, Kak Gandha, Mas Andrie, dan teman-teman saya lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih telah mendukung penulis dalam melewati masa-masa perkuliahan, semoga kita semua sehat selalu.

Demikian Kata Pengantar ini saya buat dengan setulus-tulusnya dari hati terdalam. Semoga keseluruhan skripsi saya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti halnya bermanfaat untuk saya sendiri.

Jakarta, 15 Januari 2023

Penulis

Muhammad Apriliansyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
I.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
I.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
I.3 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
I.4 Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
I.5 Sistematika Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
II.1 Teori dan Konsep Penelitan	Error! Bookmark not defined.
II.2.1 Politik Kehadiran	Error! Bookmark not defined.
II.2.2 Analisis Kebijakan Kritis.....	Error! Bookmark not defined.
II.3 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
III.1 Objek dan Subjek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
III.2 Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
III.3 Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
III.3.1 Data Primer	Error! Bookmark not defined.
III.3.2 Data Sekunder.....	Error! Bookmark not defined.
III.4 Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
III.4.1 Wawancara	Error! Bookmark not defined.
III.4.2 Studi Dokumen.....	Error! Bookmark not defined.
III.5 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
III.5.1 Teknik Analisis Naratif.....	Error! Bookmark not defined.
III.5.2 Teknik Analisis Diskursus.....	Error! Bookmark not defined.
III.6 Tahapan Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
III.6.1 Reduksi Data	Error! Bookmark not defined.
III.6.2 Penyajian Data	Error! Bookmark not defined.
III.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data	Error! Bookmark not defined.
III.7 Uji Validitas Data.....	Error! Bookmark not defined.

III.8 Tabel Rencana dan Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
IV.1 Orang Asli Papua.....	Error! Bookmark not defined.
IV.1.1 Majelis Rakyat Papua.....	Error! Bookmark not defined.
IV.1.2 Kehadiran Orang Asli Papua Dalam Keterwakilan Pemerintah.....	Error! Bookmark not defined.
IV.2 Otonomi Khusus Papua.....	Error! Bookmark not defined.
IV.2.1 Pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua.....	Error! Bookmark not defined.
IV.3 Masalah Yang Ada Di Papua	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
V.1 Analisis Tujuan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 76 Tentang Pemekaran Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
V.1.1 Usaha Sentralistik dan Ketidakpercayaan Pemerintah Pusat dan Para Elite Papua Terhadap MRP dan DPRP	Error! Bookmark not defined.
V.1.2 Pendekatan Represif untuk Mengurangi Gerakan Separatisme	Error! Bookmark not defined.
V.2 Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 2/2021 Pasal 76 Terhadap Kehadiran OAP Dalam Mengatur DOB	Error! Bookmark not defined.
V.3 Analisis Politik Kehadiran dalam Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 76	Error! Bookmark not defined.
V.4 Analisis Kebijakan Kritis dalam Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 76	Error! Bookmark not defined.
V.4.1 Pengaruh Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
V.4.2 Teks Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
V.4.3 Implementasi Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
V.4.4 Hak Istimewa Kebijakan (Analisis Kebijakan Kritis).....	Error! Bookmark not defined.
BAB VI.....	Error! Bookmark not defined.
VI.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
VI.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Framework Critical Policy Analysis</i>	17
Tabel 2 Tabel Rencana dan Waktu Penelitian.....	29
Tabel 3 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Daerah Pemekaran di Indonesia 2008-2017	56
Tabel 4 Jumlah keterwakilan DPR Papua pada Pemilu 2019.....	65